

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan masyarakat, khususnya keluarga dan orang tua, diwajibkan untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek kesehatan, pendidikan, identitas, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan lebih ketat mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang merugikan mereka. Selain itu, undang-undang ini mencakup pengaturan khusus mengenai peradilan yang ramah anak. Dalam proses peradilan, diupayakan agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan maksimal dan diperlakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, guna meminimalkan dampak psikologis yang dapat mereka alami. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sosial, undang-undang ini mengatur perlindungan tambahan yang menjamin hak-hak mereka agar tidak terabaikan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Kota Makassar, pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Perda ini menetapkan berbagai kewajiban bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa untuk berperan aktif dalam perlindungan anak. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar, legislator H. Saharuddin Said menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan pemerintah dalam mendukung program "Jagai Anakta" yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti penelitian yang dilakukan oleh Andani, Setyowati, & Amin (2019). "Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota", menemukan hasil yang relevan dengan topik yang dibahas bahwa teori model kesesuaian oleh David C. Korten berhasil memberikan kerangka untuk mengevaluasi implementasi program dalam penelitian ini. Meskipun ada beberapa aspek yang telah memenuhi kriteria kesesuaian, seperti kemampuan organisasi pelaksana, tantangan utama terletak pada pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada Program Pelayanan One Day Service

Selanjutnya dari Satriani & Harsasto, (2019) tentang Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai layanan seperti penanganan pengaduan, layanan medis, psikologis, rehabilitasi, serta bantuan hukum. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, efektivitas program masih rendah karena tingginya angka kekerasan yang terus meningkat. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya, stigma sosial yang menghalangi perempuan untuk melapor, serta tumpang tindih fungsi antara DP3A dan PPT.

Kemudian penelitian dari YUDHA, A. N. A. (2021). Tentang Fungsi Shelter Warga Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan shelter telah membantu menurunkan angka kekerasan di wilayah tersebut, meskipun masih terdapat tantangan signifikan. Shelter warga menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta stigma sosial yang membuat masyarakat enggan melapor. Penelitian ini juga mencatat bahwa komunikasi dan koordinasi antara shelter dengan lembaga lain perlu ditingkatkan untuk memperkuat jaringan dukungan bagi korban. Relevansinya terletak pada fenomena yang terjadi yaitu sama-sama bermasalah pada kurangnya sumber daya manusia dan anggaran.

Musdalifah, M. (2021). Tentang Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Shelter Warga telah berjalan dengan baik sejak diluncurkan pertama kali pada akhir 2016 di lima kelurahan. Sejak itu, program ini telah diperluas ke 153 kelurahan di 15 kecamatan, menjadikannya salah satu inovasi pelayanan publik yang mendapatkan pengakuan melalui penghargaan Innovative Government Award pada tahun 2019. Program ini dinilai berhasil karena memenuhi kriteria inovasi yang mencakup pembaruan dalam pelayanan, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan untuk direplikasi di wilayah lain.

Shelter Warga merupakan sebuah program pelayanan berbasis komunitas yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pendampingan bagi individu yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, maupun tindak pidana perdagangan orang. Program ini juga berfokus pada pencegahan kekerasan, pemenuhan hak anak, serta memberikan layanan psikososial kepada masyarakat

Pembentukan Shelter Warga di Kota Makassar berakar dari kebutuhan mendesak untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak, menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Menurut data UPTD PPA Kota Makassar, selama tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 520 kasus. Hal ini lebih sedikit dibanding tahun 2023 yang mencatat sebanyak 638 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis kasus. Termasuk didalamnya adalah korban prostitusi online. Kadis DP3A Kota Makassar Achi Soleman mengatakan bentuk dan jenis kekerasan terhadap Perempuan dan anak ini yang terjadi masih cukup tinggi dari Tahun 2022 yang berjumlah 488 kasus. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar mengidentifikasi perlunya sebuah sistem dukungan yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan langsung kepada korban.

Gambar 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan Kecamatan 2023-2024



Sumber: UPTD PPA Kota Makassar

Program Shelter Warga dimulai pada tahun 2016 sebagai program prioritas DP3A. Hal ini ditandai dengan keluarnya SK Walikota Makassar Nomor 1388/474.05/Kep/X/2016, yang menetapkan pembentukan Shelter Warga sebagai layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di berbagai kelurahan. Program ini diluncurkan dengan percontohan di lima kelurahan: Manggala, Maccini Parang, Maccini Sombala, Pannampu, dan Tamamaung. DP3A menargetkan untuk memiliki shelter di 153 kelurahan hingga tahun 2026. Melalui pendekatan berbasis komunitas, shelter ini melibatkan warga setempat yang memiliki kepedulian tinggi untuk berperan aktif dalam penanganan kasus kekerasan. Setiap shelter dikelola oleh pengurus yang dilatih untuk memahami hak-hak perempuan dan anak, serta

cara menangani kasus-kasus kekerasan secara efektif. Dengan adanya Shelter Warga, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan dan menangani kasus-kasus kekerasan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, shelter tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi korban.

Shelter ini dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, dengan melibatkan pengurus yang terdiri dari anggota masyarakat setempat. Pengurus shelter terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang dalam hal ini merupakan warga kelurahan Maccini Sombala, mereka memiliki peran penting dalam mengelola operasional sehari-hari, termasuk memberikan layanan langsung kepada korban. Mereka dilatih untuk memahami isu-isu kekerasan berbasis gender dan cara-cara untuk mendukung korban secara efektif. Shelter ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) kota Makassar, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBHI-APIK), dan lainnya, untuk memperkuat jaringan dukungan bagi korban. Adapun layanan yang diberikan berupa layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, Rumah Aman dan bantuan hukum. Dengan demikian, shelter tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak.

Koordinasi antara pengurus shelter dan DP3A dilakukan secara langsung. Pengurus shelter dapat menghubungi bidang terkait di DP3A jika mereka menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan dalam menangani kasus tertentu. Ini menciptakan jalur komunikasi yang efektif, memungkinkan pengurus untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan yang diperlukan dalam situasi darurat atau ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Pengurus shelter bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Babinsa (Bintara Pembina Desa), serta tokoh masyarakat lainnya, seperti ketua PKK dan posyandu. Keterlibatan mereka sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program shelter serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Prosedur kerja program dimulai dengan pembentukan shelter, di mana lokasi yang aman dan nyaman dipilih untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi korban. Setelah shelter berdiri, masyarakat diajak untuk mengenali keberadaan program ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus shelter. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan dan cara melaporkannya. Ketika seorang korban datang ke shelter, mereka akan mendapatkan layanan pengaduan yang ramah dan tidak menghakimi. Proses ini melibatkan wawancara awal untuk memahami situasi korban serta kebutuhan mereka. Setelah itu, jika diperlukan, korban dapat tinggal di Rumah Aman yang disediakan di dalam shelter. Di sini, mereka akan mendapatkan perlindungan sementara sambil menjalani proses rehabilitasi. Selama tinggal di shelter, korban akan mendapatkan berbagai layanan pendukung, termasuk rehabilitasi kesehatan fisik dan mental, serta bantuan hukum untuk menghadapi proses hukum jika mereka memilih untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Tim pengurus shelter bekerja sama dengan tenaga medis dan psikolog untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perawatan yang sesuai.

Dalam praktiknya, shelter warga memberikan pelayanan level bawah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, setelah korban mendapatkan perlindungan di Shelter Warga, langkah selanjutnya tergantung pada beratnya kasus yang dialami. Untuk kasus-kasus ringan, pengurus shelter berupaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui mediasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial di lingkungan sekitar dan mencegah keretakan dalam komunitas. Dalam banyak kasus, penyelesaian secara musyawarah ini berhasil mengurangi ketegangan dan memberikan solusi yang lebih harmonis bagi semua pihak yang terlibat. Namun, untuk kasus-kasus yang lebih serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Shelter Warga akan merujuk korban ke lembaga layanan yang lebih formal, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau kepolisian. Proses rujukan ini dilakukan dengan cepat untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan medis dan hukum yang diperlukan. Selain itu, shelter juga berperan dalam melakukan pemantauan pasca-rujukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang berkelanjutan.

Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas program dan layanan yang diberikan. Data mengenai kasus-kasus yang ditangani dikumpulkan untuk membantu pengembangan strategi pencegahan di masa depan. Dengan pendekatan yang holistik ini, Shelter Warga di Kelurahan Maccini Sombala berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.

Penerima manfaat diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang keberadaan shelter dan layanan yang ditawarkan. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus shelter dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), masyarakat diberikan informasi mengenai fungsi shelter, prosedur pengaduan, serta jenis bantuan yang dapat mereka terima. Peningkatan kesadaran ini sangat penting agar korban merasa nyaman dan aman untuk datang ke shelter ketika mereka membutuhkan bantuan. Kapasitas penerima manfaat Program Shelter Warga di Kelurahan Maccini Sombala ditingkatkan melalui pemahaman yang baik tentang layanan yang tersedia, pelatihan bagi pengurus dan relawan, akses ke berbagai jenis bantuan, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan perlindungan dapat memanfaatkan fasilitas dengan maksimal dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari pengalaman kekerasan.

Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, implementasi program shelter warga di kelurahan Maccini Sombala sendiri masih terdapat sejumlah hambatan. Kekurangan sumberdaya finansial masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi proses implementasi dan efektivitas program ini, bukan hanya di kelurahan maccini sombala, namun juga di beberapa kelurahan lain di kota Makassar. Berdasarkan disertasi yang ditulis Saenab (2020) dengan judul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar" dimana salah satu informannya Ibu Indah selaku Ketua Shelter Kelurahan Manggala mengatakan bahwa biaya operasional dalam pengelolaan Shelter hanya Rp.1.700.000 per tiga bulan, dimana biaya ini dinilai tidak cukup. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini karena sosialisasi tentang keberadaan shelter dan fungsinya yang belum merata.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM SHELTER WARGA DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA KOTA MAKASSAR"**.

I.2 Tinjauan teori

Peneliti selanjutnya meninjau berbagai teori yang dapat menjelaskan seperti apa implementasi program Shelter Warga di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan tujuan menekan angka kekerasan kepada perempuan dan anak di kelurahan Maccini Sombala. Dari teori-teori yang ditinjau, peneliti memilih satu teori yang paling sesuai untuk menjelaskan fenomena yang diangkat. Teori terpilih ini akan digunakan untuk menganalisis implementasi program Shelter Warga di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar.

Pertama, Model Three Way Fit atau yang biasa dikenal Teori Kesesuaian Implementasi Program dari David C. Korten (1980). Implementasi program meliputi tiga indikator yang disebutnya sebagai model kesesuaian yaitu Program, Organisasi Pelaksana, dan Kelompok Sasaran:

1. Program

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Jika program tidak relevan atau tidak memenuhi kebutuhan nyata pemanfaat, maka kemungkinan besar program tersebut tidak akan berhasil.

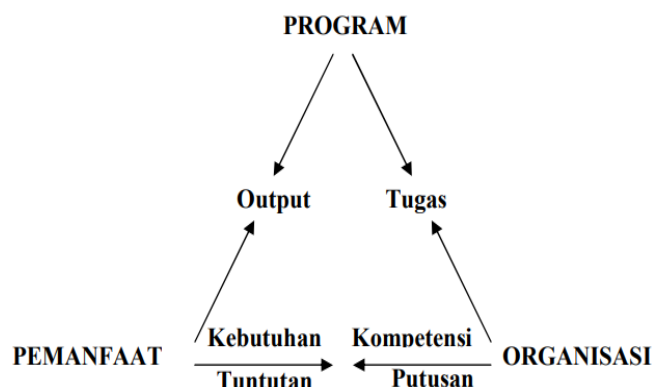
2. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Indikator kedua ini menekankan bahwa organisasi yang melaksanakan program harus memiliki kapasitas, sumber daya, dan struktur yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Tanpa dukungan organisasi yang memadai, program akan sulit untuk dijalankan dengan baik.

3. Kelompok Sasaran

Indikator ketiga menyoroti pentingnya hubungan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Organisasi harus mampu menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh kelompok sasaran untuk mendapatkan manfaat dari program.

Gambar 2. Model Three Way Fit David C. Korten



Sumber : David C. Korten dalam Akib dan Tarigan (2008 : 12)

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Teori ini sudah menjadi rujukan di beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Nawangsari (2023). Implementasi Program Smart Inclusive School (SIS). Fadilah (2022). Model implementasi program pemberdayaan perempuan melalui Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS): Studi deskriptif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu. Rosida (2021). Model Kesesuaian Implementasi Program Dalam Peningkatan Sektor Pertanian Di Kota Batu Melalui JUT dan Japro.

Kedua, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variable yang mempengaruhi:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi diluar

sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

c. Karakteristik Agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implelementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan, semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen/pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga inginkan.

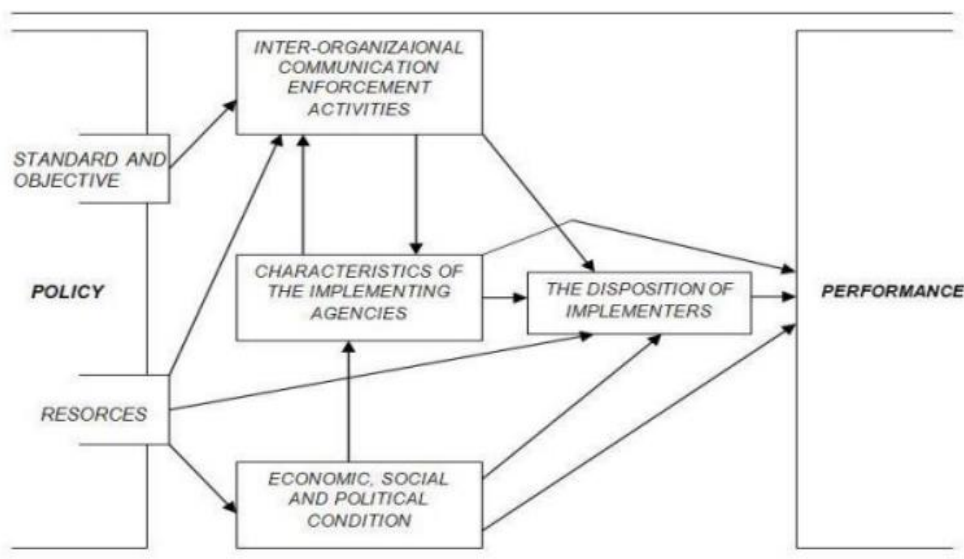
e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan- kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang tidak ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Gambar 3. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn, 1975: 463.

Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih kepada mengukur dan menjelaskan tentang pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin di implementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Teori ini sudah menjadi rujukan di beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Witaradya (2021). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process. Kurniawan, Alexandri, Nurasa (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. Rahmah, Rifka (2018). Kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di dusun rantaupandan kecamatan rantaupandan kabupaten bungo provinsi jambi.

Ketiga, Menurut Teori Merilee S. Grindle (1980) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

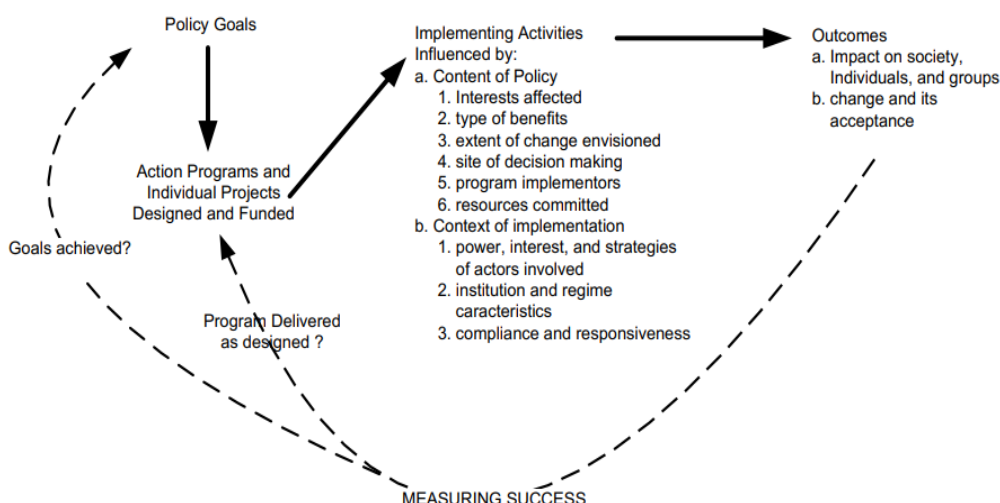
a. content of policy:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups. Contoh : masyarakat di wilayah slum areas (daerah kumuh) lebih suka menerima program air bersih dan listrik daripada menerima program kredit sepeda motor .
3. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan) contoh : program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah program sudah tepat di suatu lembaga.
5. Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.
6. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.

b. Context of implementation:

1. Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber: Merilee S. Grindle, 1980: 11

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle menawarkan pandangan komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik diterapkan dalam praktik. Keunikan utama dari model ini terletak pada pendekatannya yang holistik, di mana ia mempertimbangkan baik isi kebijakan maupun konteks di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Grindle berargumen bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen isi kebijakan, seperti kepentingan kelompok sasaran dan jenis manfaat yang dihasilkan, serta konteks implementasi yang mencakup dinamika kekuasaan, karakteristik lembaga, dan kondisi sosial-politik.

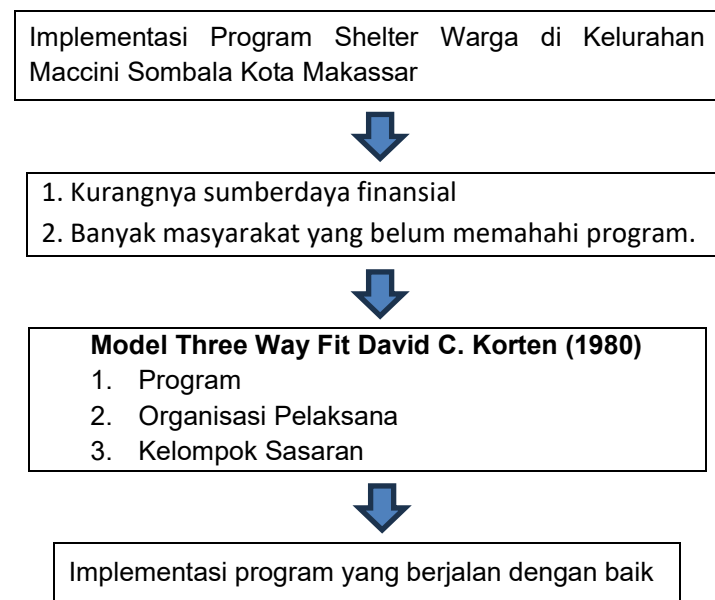
Model ini juga menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada keputusan di tingkat atas tetapi juga pada bagaimana kebijakan diterima dan dilaksanakan di lapangan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan meningkatkan relevansi dan efektivitasnya. Dalam hal pengukuran keberhasilan, Grindle menyarankan agar evaluasi tidak hanya fokus pada proses pelaksanaan tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Model ini fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik di negara maju maupun negara berkembang, menjadikannya relevan untuk analisis implementasi kebijakan di berbagai situasi.

Teori ini sudah menjadi rujukan di beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Royali, Ardhana, Awalia, Sholiha (2024). APAKAH PROGRAM “JAMULA” BERDAMPAK TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN? DITINJAU DARI TEORI MERILEE GRINDLE. Khusufmawati, Nurasa, Alexandri (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). Maryam, Cahyani (2022). Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo.

Peneliti kemudian memilih untuk menggunakan teori Three way fit oleh David C. Korten. Pemilihan teori ini dikarenakan peneliti merasa teori ini cukup relevan dengan fenomena yang terjadi, karena dari indikator teori tersebut yaitu Program (kesesuaian antara program dan kelompok sasaran), Organisasi Pelaksana (kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana), dan Kelompok Sasaran (kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana) akan sangat berpengaruh dalam melihat keberhasilan program tersebut.

Untuk memudahkan penelitian mengenai implementasi program shelter warga di kelurahan Maccini Sombala, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagaimana panduan serta memberikan batasan terhadap penelitian ini sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.

Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti (2024)

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program Shelter Warga di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar, dan memberikan saran pengembangan program yang lebih berkelanjutan, menggunakan model Three Way Fit dengan 3 indikatornya yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran sebagai indikator pelaksanaannya.

I.3.2 Manfaat

Manfaat penelitian ini mencakup beberapa aspek:

a) Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mendalami isu perlindungan perempuan dan anak atau kebijakan sosial di tingkat lokal.

b) Manfaat Praktis

- Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang implementasi program shelter Warga dan dinamika perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Maccini Sombala, serta memperoleh pengalaman dalam melakukan evaluasi program sosial dan menganalisis kebijakan publik.
- Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menilai efektivitas program shelter Warga, yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.
- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan shelter dan mendorong partisipasi aktif dalam program perlindungan, serta memberikan informasi yang lebih jelas tentang layanan shelter dan cara mengaksesnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

II. 1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata kata tertulis atau lisan dari individu-individu serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan saat ini, dengan tujuan memberikan solusi masalah serta informasi terkini yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Metode ini banyak diterapkan pada berbagai masalah. Secara umum, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual, dan akurat.

Alsa (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu interpretatif sederhana yang bersentral pada pengertian atau pemaknaan peneliti mengenai masalah tertentu. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, bukan angka, meliputi transkrip interview, catatan lapangan, fotografi, rekaman video, dokumen personal, memo, dan catatan resmi lainnya. Patton membagi tiga macam metode pengumpulan data kualitatif yakni in-depth interview, observasi langsung, dan dokumen tertulis.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami subjek dalam masalah sosial kemanusiaan yang diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, maupun pengamatan dokumen, yang kemudian hasilnya tidak untuk digeneralisasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pengimplementasian program shelter warga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

II. 1.1 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007,17) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi Program Shelter Warga dalam menekan angka kasus kekerasan, khususnya terhadap anak di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar dengan menggunakan model three way fit dari David C. Korten yang indikatornya sebagai berikut:

1. Program

Sub Indikator-indikator untuk elemen ini mencakup:

- **Keterjangkauan:** Mengukur kemudahan akses kelompok sasaran terhadap program. Ini mencakup aspek fisik (lokasi), finansial (biaya), dan informasi (pengetahuan tentang program). Keterjangkauan yang baik memastikan bahwa lebih banyak individu dalam kelompok sasaran dapat memanfaatkan program.
- **Kesesuaian Tujuan:** Memastikan bahwa tujuan program sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran. Tujuan yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengurangi partisipasi kelompok sasaran dalam program.
- **Partisipasi:** Mengukur tingkat keterlibatan kelompok sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Partisipasi aktif dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program, serta meningkatkan efektivitasnya.

2. Organisasi Pelaksana

Sub Indikator-indikator untuk elemen ini meliputi:

- **Struktur Organisasi:** Menilai apakah struktur organisasi mendukung pelaksanaan program secara efektif. Struktur yang jelas dengan pembagian tugas yang baik akan mempermudah koordinasi dan komunikasi antar anggota tim.

- **Kemampuan Organisasi:** Menilai apakah organisasi pelaksana memiliki sumber daya (manusia, finansial, teknis) yang cukup untuk melaksanakan program. Organisasi harus memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

3. Kelompok Sasaran

Sub Indikator-indikator untuk elemen ini mencakup:

- **Kriteria Penerima Manfaat:** Menilai apakah kriteria yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana untuk penerima manfaat sesuai dengan kondisi dan kemampuan kelompok sasaran. Kriteria yang tidak realistis dapat menghalangi akses kelompok sasaran terhadap output program.
- **Feedback dan Evaluasi:** Adanya mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari kelompok sasaran mengenai pelaksanaan program, yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa depan.

II. 2 Desain Penelitian

Terdapat berbagai macam paradigma dalam penelitian kualitatif antara lain interaksi simbolik, etnografi, etnometodologi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam menggali data kualitatif. Adapun menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi. (Alsa, 2014). Penelitian studi kasus yang lebih intensif dan mendalam ini ditujukan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai subjek yang diteliti dengan cakupan penelitian meliputi keseluruhan kehidupan ataupun beberapa aspek tertentu saja (Azwar, 2015). Studi kasus akan digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Shelter Warga di Kelurahan Maccini Sombala. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai dinamika yang ada di lapangan.

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Pemilihan Informan merupakan orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh didasarkan pada kualitas, keandalan, dan kekayaan informasi yang dimilikinya. Informan penelitian ini terdiri atas:

- a) Ketua Shelter Warga Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar
- b) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kota Makassar
- c) Penerima manfaat program

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk:

- a) Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah 2009). Melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pelayanan publik pada penerima manfaat program.

- b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya-jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Teknik wawancara ini bersifat informal dan digunakan untuk mengetahui pandangan, pendapat, serta perasaan masyarakat pada subyek penelitian baik tentang dirinya atau respon dan sikap serta pengalaman mereka dengan lingkungan sekitar.

c) Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah 2009). Dokumen dan laporan resmi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data statistik mengenai jumlah kasus, serta literatur yang relevan mengenai perkembangan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan mengolah, mengorganisir data, dan memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil. Analisis data ini berarti mengatur secara sistematis hasil pengumpulan data, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.

Aktivitas dalam analisis data ini menggunakan teori Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana Kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016:247). Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilih data-data yang penting dari banyaknya data yang diperoleh dari tempat penelitian. Dan kemudian membuang data-data yang tidak perlu untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Sehingga akan diperoleh data-data yang tepat mengenai implementasi program shelter warga di kelurahan Maccini Sombala, kota Makassar

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2016:249). Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya, data yang lebih baik adalah jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif yaitu berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian. Data-data yang tersusun dengan benar dalam penyajian data memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dengan benar juga.

3. Kesimpulan (conclusion)

Penarikan Kesimpulan adalah langkah ketiga dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara dan bisa saja berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan begitu kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah namun mungkin saja tidak, karena seperti yang sudah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2016:252). Jika kesimpulan tidak memadai maka perlu diadakan penelitian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan. Dengan begitu, analisis data merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data dan merupakan suatu proses siklus sampai aktivitas penelitian selesai.

II.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen penelitian. Peng-ujian validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan/memahami kejadian atau fenomena yang menarik dari sudut pandang informan. Untuk mengetahui apakah data yang ditemukan dalam lapangan sudah absah atau tidak, maka peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Dimana menurut (Moleong, 2011, p.331), triangulasi sumber adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan juga dibandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam buku. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait good corporate governance, dilanjutkan dengan melakukan observasi terkait penerapannya di lapangan, serta validasi hasil melalui konfirmasi dengan pelanggan (masyarakat).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapanpun alat itu diukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing aktivitas penelitian misalnya dengan melakukan review keseluruhan hasil penelitian. Pengujian reliabilitas di pihak lain menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Jadi peneliti bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi yang mana dapat berpengaruh dalam penelitiannya.